

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kabupaten Kudus

Halaman 9 dan 11

Setoran 11 Pos Pajak Minim

Juli ini Direalisasi BPPKAD Kudus 63 Persen

KUDUS - Penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kudus hingga Juli tahun ini, ternyata belum mencapai target awal yang ditentukan. Padahal seharusnya penerimaan pajak selama tujuh bulan sudah mencapai 63 persen atau Rp 96,93 miliar

Namun memasuki Juli lalu, setoran pajak daerah baru terealisasi sebanyak 62 persen atau sebesar Rp 59,77 miliar. Hal itu diakui Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus Eko

Paling rendah setoran pajak daerah berasal dari pos pajak mineral bukan logam dan batuan, saat ini baru terealisasi 10 persen

DJUMARTONO
Kepala BPPKAD Kudus

Djumartono .

Menurut Eko, penerimaan pajak tersebut bersumber dari 11 pos penerimaan pajak, yakni pajak hiburan, sarang walet, restoran, air tanah, mineral bukan logam dan batuan. "Dari

11 pos penerimaan pajak, belum sesuai target awal yang ditentukan," tegasnya.

Eko memaparkan, realisasi penerimaan pajak tertinggi sampai Juli berasal dari setoran pajak hiburan sebesar 99 persen. Kemudian untuk pos pajak sarang walet baru terealisasi 79 persen atau Rp 23,77 juta.

Selanjutnya untuk realisasi penerimaan pajak restoran mencapai 77 persen atau sebesar Rp 4,38 miliar. Sedangkan realisasi penerimaan pajak air tanah sampai Juli ini baru Rp 1,07 miliar.

"Paling rendah setoran pajak daerah berasal dari pos pajak mineral bukan logam dan batuan, saat ini baru terealisasi 10 persen," imbuhnya.

Dalam setahun ini, kata Eko, rencana penerimaan dari 11 pos pajak daerah tersebut akan

► Baca SETORAN HAL... 11

terus digenjot. Diperkirakan dalam setahun dapat pemasukan pajak hotel Rp 2,2 miliar, pajak restoran Rp 5,7 miliar, pajak hiburan Rp 300 juta, pajak reklame Rp 2,55 miliar dan pajak penerangan jalan sebesar Rp 45,5 miliar.

Kemudian untuk pajak mineral bukan logam dan batuan, dalam setahun direncanakan mendapat Rp 200 juta, pajak parkir sebesar Rp 325 juta, pajak air tanah

Rp 1,45 miliar, pajak sarang burung walet Rp 30 juta, pajak bumi bangunan Rp 19,75 miliar dan bea perolehan hak tanah bangunan sebesar Rp 18,92 miliar.

Eko menambahkan, dalam APBD Perubahan Kabupaten Kudus tahun ini, rencananya akan dinaikkan targetnya. Namun demikian, pihaknya tetap optimis bisa merealisasikan target penerimaan dari sektor pajak tersebut. **(han/rif)**